

BAB II

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH MENENGAH NEGERI 3 BENGKAYANG

A. Implementasi Nilai-nilai Anti korupsi

1. Pengeritan Implementasi

Implementasi menurut Sulchan Yasin (1997:221) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pelaksanaan / penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “to implement” artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

Implementasi merupakan suatu proses ide, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Dalam Oxford Advance learner’s dictionary bahwa implementasi adalah “put something into effect”, penerapan sesuatu yang memberikan dampak dan efek (Mulyasa, 2003: 93).

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (1991: 21) implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Pendapat Cleaves yang dikutip (dalam Wahab 2008: 187), yang secara tegas menyebutkan bahwa: Implementasi itu mencakup “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi

dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.

Menurut Mazmanian dan Sebastiar (dalam Wahab, 2008: 68) Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Nurdin Usman, 2002:70).

Dari berbagai defenisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dengan kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan

2. Pengertian Nilai

Manusia dalam kehidupan akan selalu berhubungan dengan nilai. Misalnya yaitu ketika seseorang mengatakan orang lain baik atau buruk, hal ini menandakan adanya suatu penilaian terhadap suatu objek, baik dan buruk itu adalah contoh nilai. Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia.

Bahasa Inggris mengartikan nilai sebagai *value* yaitu suatu harga, penghargaan, atau taksiran. Maksudnya yaitu harga yang melekat pada sesuatu atau penghargaan terhadap sesuatu. Nilai adalah suatu kualitas atau penghargaan terhadap sesuatu, yang menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang (Muchson 2000: 16). Nilai sendiri memiliki arti sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan (Purwadarminta, 2002: 677). Nilai itu praktis dan efektif dalam jiwa dan tindakan manusia dan melembaga secara obyektif di dalam masyarakat (Muhaimin, 1993:110).

Pengertian nilai selanjutnya dipertegas lagi oleh (Noor Salimi, 2008:202) Nilai adalah suatu perangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai

suatu identitas yang memberikan corak yang khusus kepada pola pemikiran, perasaan, keterkaitan maupun perilaku. Oleh karena itu, sistem nilai dapat merupakan standard umum yang diyakini, diserapi dari keadaan objektif maupun diangkat dari keyakinan, sentimen (perasaan umum) maupun identitas yang diberikan atau diwahyukan oleh Allah SWT, yang pada gilirannya merupakan sentimen (perasaan umum), kejadian umum, identitas umum yang oleh karenanya menjadi syariat umum.

Nilai merupakan sifat yang melekat pada sesuatu (sistem kepercayaan) yang telah berhubungan dengan subjek yang memberi arti (manusia yang meyakini). Jadi nilai adalah sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi manusia sebagai acuan tingkah laku (Chabib,1996: 61).

Nilai adalah sesuatu yang abstrak dan ideal. Nilai bukan benda konkret, bukan fakta yang tidak hanya sekedar penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, yang disenangi dan yang tidak disenangi. Nilai itu terletak antara hubungan subjek penilai dengan objek (Gazalba, 2008:17). Nilai adalah yang memberikan makna hidup, yang memberi pada hidup ini titik tolak, isi, dan tujuan. Nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi, yang mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Nilai itu lebih dari sekedar keyakinan, nilai selalu menyangkut tindakan. Nilai dapat dianggap keharusan, suatu cita yang menjadi dasar bagi keputusan yang diambil seseorang. Nilai-nilai itu merupakan bagian kenyataan yang tidak dapat dipisahkan atau diabaikan. Setiap orang yang bertingkah laku sesuai dengan seperangkat nilai, baik nilai yang sudah merupakan hasil pemikiran yang tertulis maupun yang belum. (Sjarkawi, 2005: 29).

Beberapa pendapat para ahli diatas dapat di simpulkan bahwa nilai merupakan esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia. Esensi belum berarti sebelum dibutuhkan oleh manusia,tetapi tidak berarti adanya esensi karena adanya manusia yang membutuhkan. Hanya saja kebermaknaan esensi tersebut semakin meningkat sesuai dengan peningkatan daya tangkap pemaknaan manusia itu sendiri. Jadi nilai adalah sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai subyek menyangkut segala sesuatu baik atau yang

buruk sebagai abstraksi, pandangan, atau maksud dari berbagai pengalaman dengan seleksi perilaku yang ketat.

3. Pengertian Anti Korupsi

Pengertian anti korupsi dapat dirumuskan dengan memperhatikan makna kata "anti" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "anti" bermakna "melawan, menentang dan memusuhi segala sikap dan tindakan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan, berlawanan dengan hukum, dan tindakan tersebut menguntungkan diri sendiri, berlawanan dengan hukum, dan tindakan tersebut bernilai ekonomi maupun bernilai sosial yang berdampak pada kerugian kepentingan umum, keuangan dan perekonomian negara. Atau dengan perkata lain merupakan sikap dan tindakan melawan, menentang dan memusuhi adanya korupsi dalam segala bentuknya.

Pengertian antikorupsi juga dipertegas oleh (Nurdin, 2004:178) bahwa antikorupsi merupakan sikap tidak setuju, tidak suka, dan tidak senang terhadap tindakan korupsi. Anti korupsi merupakan sikap yang dapat mencegah (upaya meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan tindak korupsi) dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Sedangkan menurut (Maheka, 2006:31). Antikorupsi adalah kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan cara melakukan perbaikan sistem (hukum dan lembaga) dan perbaikan manusianya.

Pendidikan antikorupsi merupakan upaya sadar untuk memberikan pemahaman dan pencegahan tindakan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal di lingkungan keluarga, dan pendidikan nonformal di masyarakat (Nurdin, 2014:178). Selanjutnya pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai antikorupsi, tetapi terus memahami nilai-nilai, menghayati nilai-nilai dan mengamalkan nilai-nilai antikorupsi ke dalam kebiasaan hidup sehari-hari. Pendidikan antikorupsi secara umum dikatakan sebagai pendidikan koreksi budaya yang

bertujuan untuk memperkenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik.

4. Bentuk-bentuk Anti Korupsi

Menanamkan nilai-nilai anti korupsi sedari dini sangatlah penting. Terutama disampaikan disekolah dan diterapkan pada para pelajar di masa mendatang. Demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang bebas korupsi, menangkap dan memenjarakan koruptor. Oleh karena itu, sikap antikorupsi harus ditanamkan pada generasi muda sebagai langkah preventif. Mengapa nilai-nilai antikorupsi perlu disemaikan ke dalam jiwa dan roh generasi muda? Ada keyakinan luas bahwa generasi saat ini dilahirkan, dibesarkan, dan berkembang di dalam sistem dan budaya yang korup. Akibatnya, sikap generasi sekarang terhadap korupsi menjadi toleran. Mereka mengkritik dan mencela tindakan korupsi dipermukaan, tetapi hati mereka tidak memiliki keberanian untuk berurusan dengan koruptor, sehingga mereka cenderung membiarkan dan memaafkan mereka. Korupsi tidak akan pernah bisa diberantas jika sudah begini. Oleh sebab itu, generasi penerus atau yang sekarang disebut sebagai generasi muda harus didorong untuk mengembangkan pola pikir antikorupsi yang kuat.

Perubahan dari sikap membiarkan dan menerima korupsi ke sikap tegas menolak korupsi tidak akan pernah terwujud jika generasi sekarang yang masih memiliki hati nurani tidak mau dan mampu membina generasi muda untuk mengevaluasi dan memperbaiki nilai-nilai yang diwarisi dari generasi terdahulu dan sekarang sesuai dengan tuntutan, perkembangan dan kebutuhan bangsa. Nilai yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang menarik, sesuatu yang dicari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai atau sesuatu yang baik (Bertens, 2001: 139). Nilai-nilai antikorupsi yang perlu disemaikan kepada generasi muda, terutama mereka yang masih duduk di bangku Tk, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis 9 (sembilan) nilai integritas yang bisa mencegah terjadinya tindak korupsi. Kesembilan nilai itu adalah 1) Kejujuran, 2) Peduli, 3) Mandiri, 4) Disiplin, 5) Tanggungjawab, 6) Kerja keras, 7) Sederhana, 8) Berani, dan 9) Adil. Secara singkat, mari kita pahami kesembilan nilai integritas ini.

1) Kejujuran

Kejujuran adalah sifat (keadaan) jujur, ketulusan hati, dan kelurusan hati (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 479). Kejujuran adalah mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang dilakukan, dialami dan dirasakan. Kejujuran merupakan dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral. Tanpa kejujuran, manusia tidak dapat maju selangkah pun, karena ia tidak berani menjadi diri sendiri. Tanpa kejujuran, keutamaan-keutamaan moral lainnya akan kehilangan nilainya. Bersikap baik kepada orang lain, tetapi tidak dilandasi kejujuran adalah kemunafikan dan racun bagi diri sendiri. Tidak jujur berarti tidak seiya-sekata dan itu berarti orang yang tidak jujur belum sanggup mengambil sikap yang lurus. Orang yang tidak lurus, tidak menempatkan dirinya sebagai titik tolak, tetapi lebih mengutamakan apa yang diperkirakan diharapkan oleh orang lain.

Kejujuran dimulai dari lingkungan sekitar, seperti keluarga, kelas, sekolah, dan rumah sendiri. Orang jujur, seperti bola salju, akan terus bergulir untuk membangun keluarga yang jujur. Keluarga yang jujur terus tumbuh, membentuk lingkungan hidup yang paling jujur. Lingkungan yang jujur tanpa pamrih pada akhirnya akan menghasilkan masyarakat yang jujur tanpa pamrih, dan masyarakat yang tidak pemaaf tersebut pada akhirnya akan mampu membangun karakter bangsa yang tidak kenal ampun. Finlandia adalah contoh dalam hal ini. Berkata dan berbuat benar, jujur, hormat, terbuka, menghargai diri sendiri, dapat dipercaya, dan memiliki niat yang lurus terhadap setiap tindakan adalah ungkapan-ungkapan penting dalam kejujuran (Bahri, 2008: 15; Tamrin, 2008: 16).

Kehidupan sekolah maupun kampus, nilai kejujuran dapat diwujudkan oleh siswa dan mahasiswa, dengan tidak melakukan kecurangan akademik, seperti tidak berbohong kepada guru dan dosen, tidak mencontek saat ujian, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak memalsukan nilai.

2) Kepedulian

Kepedulian berasal dari kata “peduli”, artinya mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002:841). Kepedulian bermakna berperilaku dan memperlakukan orang lain dan lingkungan sekitarnya, sehingga bermanfaat bagi semua pihak. Peduli merupakan sifat yang dapat membuat segala kesulitan dapat dihadapi, segala keadaan dapat ditanggung bersama, dan keterbatasan pun dapat dicarikan solusinya. Kata kunci peduli adalah memahami, menghargai, mendukung, menghormati, dan menolong (Bahri, 2008: 17). Wujud dari nilai kepedulian dalam kehidupan di sekolah dan kampus diantaranya adalah mematuhi peraturan sekolah dan tata tertib kampus, membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi teman, merawat tanaman di sekitar sekolah dan kampus, tidak merusak fasilitas umum, serta merawat dan menjaga barang-barang milik umum.

3) Kemandirian

Mandiri berarti dapat berdiri diatas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Kemandirian dianggap sebagai suatu hal yang penting harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena tanpa kemandirian seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain. Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang untuk menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain. Mentalitas kemandirian yang dimiliki seseorang dapat mengoptimalkan daya pikirnya guna bekerja secara efektif. Kemandirian bukan merupakan pembawaan yang melekat pada diri individu sejak lahir. Perkembangan kemandirian seseorang dipengaruhi oleh berbagai stimulasi yang datang dari lingkungan selain dari potensi keturunan. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kemandirian seorang remaja menurut Ali dan Asrori: Gen atau keturunan orang tua; Pola asuh orang tua; Sistem pendidikan di sekolah; Sistem kehidupan di masyarakat (Muhammad Ali, 2006:110).

4) Kedisiplinan

Kedisiplinan berasal dari kata disiplin, artinya tata tertib, ketaatan kepada peraturan (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 268). Disiplin merupakan kunci sukses, sebab dalam disiplin akan tumbuh sifat yang teguh dalam memegang prinsip, pantang mundur dalam menyatakan kebenaran, dan pada akhirnya mau berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara (Bahri, 2008: 3). Hidup disiplin tidak berarti harus hidup seperti pola militer dengan hidup di barak bagai robot, tetapi hidup disiplin dipahami siswa atau mahasiswa dengan cara mengatur dan mengelola waktu sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Manfaat hidup disiplin adalah siswa atau mahasiswa dapat mencapai tujuan atau mengejar kepentingan secara lebih efisien dan efektif. Kata kunci kedisiplinan adalah komitmen, tepat waktu, prioritas, perencanaan, taat, fokus, tekun, dan konsisten (Tamrin, 2008: 17). Wujud dari kehidupan disiplin dalam kegiatan di sekolah dan kampus, di antaranya adalah belajar sesuatu dengan cermat, mengerjakan sesuatu berdasarkan perencanaan yang matang, serta menyelesaikan tugas tepat waktu.

5) Tanggung Jawab

Nilai tanggung jawab dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk belajar dengan sungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan nilai bagus, dan mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru, serta menjaga amanah dan amanahnya diberikan kepadanya.

Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter yang perlu ditanamkan di dalam pribadi setiap manusia, supaya menjadi manusia yang memiliki kepribadian baik. Mustari (2011: 21) berpendapat bahwa tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara, dan Tuhan. Sependapat dengan Mustari, Daryanto (2013: 142) menyatakan bahwa tanggung jawab adalah sikap dan perilaku untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan,

terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), Negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.

6) Kerja keras

Kata “kerja” bermakna kegiatan melakukan sesuatu ; sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002 : 554). “Keras” berarti gigih atau sungguh-sungguh hati (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002 : 550). Dengan demikian, bekerja keras berarti melakukan sesuatu secara bersungguh-sungguh. Pribadi pekerja keras akan muncul dari sosok yang memiliki motivasi tinggi untuk berubah dan pantang menyerah dalam segala keadaan. Pribadi pekerja keras dapat diwujudkan dengan selalu melakukan tanggung jawab secara sungguh-sungguh serta melakukan segala sesuatu dengan upaya terbaik, sekuat tenaga, penuh kecerdasan tinggi, dan sepenuh hati.

Kerja keras merupakan salah satu dari delapan anak tangga untuk mencapai keberhasilan. Anak tangga lainnya adalah mencapai tujuan dengan menggunakan orang lain, penampilan yang baik, keyakinan diri, membuat keputusan, pendidikan, dorongan ambisi, dan pandai berkomunikasi. Karena pentingnya kerja keras, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW, secara simbolik memberi hadiah kapak dan tali kepada seorang laki-laki agar dapat digunakan untuk bekerja (Alma 2008: 106).

Kata kunci kerja keras adalah semangat, gigih, usaha, keyakinan, tabah, keras pendirian, pantang menyerah, terus berharap, dan mempunyai impian (Bahri, 2008 : 16 ; Tamrin, 2008 : 20). Wujud dari nilai kerja keras dalam kehidupan di sekolah dan kampus, di antaranya adalah tidak mengambil jalan pintas dalam mencapai tujuan, menghargai proses tidak sekadar mencapai hasil akhir, menggunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk mengejar suatu target atau tujuan, serta tidak terlalu memikirkan apa yang akan diperoleh, tetapi memikirkan apa yang harus dapat dihasilkan.

7) Kesederhanaan

Kesederhanaan berasal dari kata sederhana, artinya bersahaja, tidak berlebih-lebihan (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 1008). Kesederhanaan

adalah sikap dan perilaku yang tidak berlebihan terhadap suatu benda, tetapi lebih mementingkan tujuan dan manfaatnya. Hidup sederhana berarti hidup bersahaja dan tidak berlebih-lebihan yang didasari oleh suatu sikap mental rendah hati. Kata kunci sederhana adalah bersahaja, tidak berlebihan, sesuai kebutuhan, apa adanya, dan rendah hati (Tamrin, 2008: 19).

Wujud dari nilai kesederhanaan dalam kehidupan sekolah dan kampus, di antaranya adalah rendah hati dalam pergaulan di sekolah dan kampus, berpakaian dan menggunakan asesoris tidak berlebihan, tidak boros dalam memenuhi kebutuhan hidup, tidak suka pamer kekayaan, serta hemat dalam menggunakan air, listrik, dan energi lainnya

8) Keberanian

Keberanian berasal dari kata berani, yang artinya mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 138). Keberanian adalah tindakan untuk memperjuangkan sesuatu yang diyakini kebenarannya. Orang yang berani mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, merupakan agen penting dalam mengembangkan nilai-nilai antikorupsi. Mengatakan kebenaran adalah pahit dan buahnya adalah manis, yaitu terwujudnya pribadi dan masyarakat yang baik dan benar. Kata kunci keberanian adalah mantap, tegar, hadapi, tekak, semangat, target, fokus, perjuangan, percaya diri, tak gentar, tidak takut, dan pantang mundur (Bahri, 2008: 17; Tamrin, 2008: 23).

Nilai keberanian dalam kehidupan sekolah dan kampus dapat diwujudkan dengan indikator berani bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat, berani membela kebenaran dan keadilan betapa pun pahitnya, dan berani mengakui kesalahan.

9) Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, artinya sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak; berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran; sepatutnya, tidak sewenang-wenang (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 8). Kata keadilan juga memiliki makna yang beragam. Cephalus, seorang hartawan

terkemuka Athena, memaknai keadilan sebagai bersikap fair dan jujur dalam membuat kesepakatan (Rasunto, 2005: 8). Plato, seorang filsuf Yunani terkenal, memahami keadilan sebagai keseimbangan atau harmoni. Dalam bahasa Arab, kata adil berasal dari kata adl, yang kata kerjanya adalah adala, yang berarti: (1) meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah, (2) melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju jalan lain (yang benar), (3) sama atau sepadan atau menyamakan, (4) menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam keadaan yang seimbang (Khadduri, 1999: 8). Keadilan adalah memperlakukan seseorang sesuai dengan kebutuhan dan haknya. Kata kunci keadilan adalah objektif, sesuai, netral, proporsional, tidak memihak, berpikiran terbuka, dan penuh pertimbangan (Bahri, 2008: 16; Tamrin, 2008: 21). Nilai keadilan dalam kehidupan sekolah dan kampus dapat diwujudkan dengan sikap dan perilaku tidak memilih teman dalam bergaul, memberikan pujian kepada teman yang berprestasi, serta tidak menyepelekan atau merendahkan teman.

B. Peran Guru dalam Mengimplementasikan Nilai-nilai Antikorupsi

Peran Guru sangat penting bagi siswa untuk memberikan pemahaman tentang apa itu Tindakan Korupsi dan juga berperan menanamkan nilai-nilai kejujuran terhadap siswa, agar siswa Dapat melakukan sebuah tindakan yang jujur dan tidak melakukan suatu kebohongan atau tindak Korupsi. Peran guru selain bertugas sebagai pengajar dalam proses belajar mengajar selama di sekolah. Mereka juga memiliki tugas lain, yakni menjadi panutan bagi para anak didik dengan kewibawan, tanggungjawab, taat peraturan dan lain sebagainya. Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka pelaksanaan pemahaman anti korupsi di sekolah perlu memperhatikan beberapa hal terkait (Modern Didactic Center, 2006) diantaranya adalah :

1. Pengetahuan Tentang antikorupsi

Pengetahuan yang benar dan tepat tentang korupsi, siswa perlu mendapatkan berbagai informasi yang, terutama informasi yang memungkinkan

mereka dapat mengenal tindakan korupsi dan juga dapat membedakan antara tindakan kejahatan korupsi dengan tindakan kejahatan lainnya. Untuk itu pembahasan tentang kriteria, penyebab dan akibat korupsi merupakan materi pokok yang harus diinformasikan pada siswa.

Disamping itu siswa memiliki argumen yang jelas mengapa perbuatan korupsi dianggap sebagai perbuatan yang buruk dan harus dihindari. Analisis penyebab dan akibat dari tindakan korupsi pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek moralitas akan memberi siswa wawasan tentang korupsi yang lebih luas. Pada akhirnya berbagai alternatif yang dapat ditempuh untuk menghindari korupsi dapat menjadi inspirasi bagi siswa tentang banyak cara yang dapat dilakukan dalam memberantas korupsi. Kesemua ini merupakan modal dasar dalam penanaman atau pembentukan sikap dan karakter antikorupsi.

Berdasarkan pengetahuan yang dimiliki tersebut diharapkan siswa mampu untuk menilai adanya perilaku korup dalam masyarakat atau institusi disekitarnya. Karena itu pemberian informasi tentang korupsi bukanlah untuk memberikan informasi sebanyak mungkin kepada siswa, melainkan informasi itu diperlukan agar siswa mampu membuat pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam menilai. Dengan kata lain berdasarkan informasi dan pengetahuannya tentang korupsi siswa mampu menilai apakah suatu perbuatan itu termasuk korupsi atau tidak, dan apakah perbuatan tersebut dikategorikan baik atau buruk. Dengan pertimbangan tersebut selanjutnya siswa dapat menentukan perilaku yang akan diperbuatnya.

2. Pengembangan sikap Anti Korupsi

Sebagai pemahaman nilai dan karakter, pemahaman dalam pemahaman antikorupsi memberi perhatian yang besar pada pengembangan aspek sikap siswa. Sikap merupakan gejala internal yang memiliki dimensi afektif berupa kecenderungan untuk bereaksi atau merespons secara relative menempel pada objek, orang, peristiwa dan sebagainya, baik secara positif atau negatif. Sikap adalah sesuatu yang dipelajari dan sikap menentukan bagaimana individu bereaksi terhadap situasi dan menentukan apa individu mencari dalam hidup

mereka. Sikap mengandung tiga komponen yaitu komponen kognitif, komponen afektif dan perilaku.

Guru adalah seseorang yang melaksanakan tugas pokoknya, yaitu: mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan siswa di dunia pendidikan. Guru adalah pendidik profesional karena dia secara implisit telah menawarkan diri untuk menerima dan bagian dari pilihan amanah pendidikan yang dipikul di pundak orang tua, Artinya orang tua telah memberikan amanah atau sebagiannya tanggung jawab kepada guru, oleh karena itu guru harus mempunyai perilaku yang baik karena orang tua tidak mungkin menyerahkan anaknya kesembarangan guru yang tidak profesional. (Fishbean, & Ajzen 1973).

Kesemua elemen diatas saling berhubungan dan saling bertukar tempat misalnya reaksi afektif dibayangi oleh perilaku yang biasa dilakukan. Karena itu sikap yang pro pada korupsi bukanlah sebuah kategori saja melainkan juga mengandung hal lainnya (Susanto, Iqbal, 2019: 16).

Perubahan pada satu elemen akan merubah pula elemen yang lainnya. Misalnya menghilangkan intensi dan perilaku mungkin akan merubah kognisi, sikap dan reaksi afektif. Oleh karena itu ketika memberikan informasi tentang korupsi, guru berusaha mengembangkan sikap berdasarkan kognisi. Untuk itu siswa harus memiliki kognisi atau pengetahuan yang benar dan dipahami secara baik, sehingga pengetahuan itu bisa bertahan lama dalam memorinya dan dapat dipergunakan setiap kali mereka akan membuat pertimbangan tertentu. Disamping itu keterlibatan yang intens dalam aktifitas yang mengandung nilai-nilai antikorupsi juga akan mengembangkan sikap yang sesuai dengan nilai tersebut.

3. Perubahan Sikap Antikorupsi

Merubah sikap yang telah dimiliki sebelumnya merupakan pekerjaan dan tugas yang tidak gampang dan terkadang menimbulkan rasa frustrasi. Apalagi jika sikap yang telah dimiliki tersebut berlawanan dengan sikap yang dikehendaki guru atau pendidik, misalnya sikap yang menganggap curang dalam ujian adalah hal yang biasa dikalangan siswa, atau mencontoh tugas kawan untuk

diakui sebagai tugas sendiri merupakan hal yang lumrah. Hal ini akan berlanjut terus dengan sikap terhadap fenomena dalam masyarakat seperti menyogok aparat pemerintah karena melanggar peraturan yang berlaku, dan lain sebagainya. Pemahaman antikorupsi menghendaki sikap seperti ini perlu untuk dirubah agar sesuai dengan nilai-nilai dasar antikorupsi. Untuk itu diperlukan pola dan strategi perubahan sikap yang bisa dipakai dari berbagai sumber misalnya untuk membentuk persepsi tentang korupsi yang berlawanan dengan persepsi yang dimiliki siswa dapat dilakukan dengan menyajikan informasi secara tak terduga melalui permainan atau parodi.

Strategi lain dalam merubah sikap adalah dengan didasarkan pada fakta bahwa pengetahuan dan sikap disimpan dalam tempat atau memori yang berbeda, karena itu diperlukan waktu untuk mencapai keduanya, artinya proses pengetahuan berubah menjadi sikap memerlukan waktu yang cukup panjang. Karena itu jika ada sikap yang pro pada korupsi sebaiknya tidak diserang secara langsung atau diatasi dengan cara persuasif. Dalam waktu panjang sikap tersebut akan berganti dengan sendirinya jika informasi yang mendiskreditkan korupsi disajikan dalam cara yang bermakna dan memancing siswa untuk berpikir secara kritis tentang fenomena tersebut. Karena disinilah reaksi yang disebut *postponement effect*, (Suci, Yoman, 2018), dimana pada awalnya Strategi lain dalam merubah sikap adalah dengan didasarkan pada fakta bahwa pengetahuan dan sikap disimpan dalam tempat atau memori yang berbeda, karena itu diperlukan waktu untuk mencapai keduanya, artinya proses pengetahuan berubah menjadi sikap memerlukan waktu yang cukup panjang. Karena itu jika ada sikap yang pro pada korupsi sebaiknya tidak diserang secara langsung atau diatasi dengan cara persuasif. Dalam waktu panjang sikap tersebut akan berganti dengan sendirinya jika informasi yang mendiskreditkan korupsi disajikan dalam cara yang bermakna dan memancing siswa untuk berpikir secara kritis tentang fenomena tersebut. Karena disinilah reaksi yang disebut *postponement effect*, (Hakim, Lukman, 2012: 141-156), dimana pada awalnya informasi tidak akan dipercayai tapi kemudian pengetahuan yang benar akan mengatasi reaksi afektif.

4. Pengembangan Karakter Antikorupsi

Pendidikan antikorupsi bukanlah seperangkat aturan perilaku yang dibuat oleh seseorang dan harus diikuti oleh orang lain. Sebagaimana halnya dengan kejahatan lainnya, korupsi juga merupakan sebuah pilihan yang bisa dilakukan atau dihindari. Karena itu pendidikan pada dasarnya adalah mengkondisikan agar perilaku siswa sesuai dengan tuntutan masyarakat. Agar perilaku tersebut dapat menjadi karakter siswa, maka beberapa langkah bisa dilakukan oleh guru PPKn di SMA Negeri 3 Bengkulu dalam pendidikan antikorupsi, diantaranya adalah:

- a. Melatih siswa untuk menentukan pilihan perilakunya. Untuk itu siswa harus diberi tahu tentang hak, kewajiban dan konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya. Jika dalam diskusi siswa mengemukakan pilihannya terhadap sesuatu maka guru bisa memberikan beberapa alternatif lain, misalnya untuk mendapatkan nilai bagus banyak cara yang bisa dilakukan. Berdasarkan alternatif pilihan tersebut siswa bisa menentukan mana yang baik atau yang buruk. Jika siswa mampu memutuskan sendiri berdasarkan pilihan yang dibuatnya, maka mereka juga berani mengatakan tidak atau ya terhadap sesuatu.
- b. Memberi siswa kesempatan untuk mengembangkan pemahaman yang luas dengan menciptakan situasi yang fleksibel dimana siswa bisa berkerjasama, berbagi, dan memperoleh bimbingan yang diperlukan dari guru. Karena itu kegiatan dalam menganalisis kasus, diskusi, bermain peran atau wawancara siswa merupakan situasi yang akan mengembangkan karakter antikorupsi pada diri siswa.
- c. Tidak begitu terfokus pada temuan fakta seperti, berapa persen PNS yang terlibat korupsi, berapa banyak uang Negara yang hilang dikorupsi pertahun atau berapa hukuman yang tepat untuk pelaku korupsi dsb. Hal itu juga penting tetapi yang lebih penting adalah bagaimana membantu siswa menemukan sumber informasi, seperti bagaimana dan dengan cara apa informasi bisa dikumpulkan, seberapa penting informasi yang didapat, pengetahuan apa yang bisa diandalkan, dan posisi apa yang harus dipilih dsb. diminta untuk menganalisis posisi yang diambilnya, menyatakan

pilihanya dan mengapa posisi lain tidak diambil. Dengan melatih siswa menggunakan tehnik berpikir kritis pertanyaan tersebut akan dapat dijawabnya.

- d. Melibatkan siswa dalam berbagai aktifitas sosial disekolah dan di lingkungannya. Ini ditujukan untuk menanamkan rasa tanggung jawab dan respek pada orang lain dalam rangka melatih mereka untuk berbagi tanggung jawab sosial dimana mereka tinggal. Bukan berarti karakter lain tidak penting tetapi dengan mengemukakan rasa tanggung jawab dan respek pada orang lain akan mengurangi rasa egoisme dan mementingkan diri sendiri yang pada umumnya banyak dimiliki para koruptor.

C. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Penanaman nilai-nilai anti korupsi merupakan pendorong sikap anti dengan budaya korupsi , melalui pendidikan kewarganegaraan merupakan korelasi mata pelajaran yang terkait, dengan kejujuran, keadilan, kedisiplinan, kesederhanaan, tanggung jawab, keberanian, kerja keras, di harapkan mampu menjadi solusi atas permasalahan bangsa terkait dengan korupsi

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah nama salah satu mata pelajaran sebagai muatan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah (Pasal 37 Ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi ditegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan termasuk cakupan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Selain itu perlu pula ditanamkan kesadaran wawasan kebangsaan, jiwa patriotisme dan demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku antikorupsi, kolusi, dan nepotisme (Kemendiknas, 2011: 1-2) Amerika Serikat, 2000: 17).

Pendidikan Kewarganegaraan adalah proses yang akan berpengaruh positif untuk membentuk warga negara dalam peranannya di masyarakat. Pendidikan Kewarganegaraan membantu generasi muda untuk memahami cita-cita nasional, macam-macam hak kemerdekaan warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Pendidikan kewarganegaraan juga dipertegas lagi oleh (Jakni, 2014:1) pendidikan pancasila dan kewarganegaraan adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan yang mempelajari hakikat kewarganegaraan suatu negara hak dan kewajiban warganegara oleh warganegara. Sedangkan warganegara dapat diartikan sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah negara dan negara adalah organisasi yang ada dan terpelihara dan interaksi-interaksi warganegara dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dimana pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup tanpa ada bantuan dari orang lain Pendidikan Kewarganegaraan merupakan proses pembinaan peranan warga negara untuk bisa menjadi menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara sebagai aspek pendidikan politik (Cholisin, 2000: 19).

2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Adanya pendidikan pancasila dan kewarganegaraan bagi bangsa indonesia akan senantiasa diupayakan untuk membentuk manusia indonesia seutuhnya, sebagaimana diupayakan dan amanatkan UUD 1945, yakni sebagai manusia indonesia yang religius, berkemanusiaan dan berkeadaban, yang memiliki nasionalisme, yang cerdas, yang berkerakyatan, dan adil terhadap lingkungan sosialnya.

Tujuan Pendidikan Nasional berdasarkan (pasal 2 ayat 3 UU No.20 Tahun 2003) adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta tanggung jawab.

Secara umum dikatakan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang baik (*to be good citizens*) (Azis Wahab dan Sapriya, 2011: 311). Menurut (Dimon dan Pflieger, 2000: 1.15) warga negara yang baik memiliki ciri-ciri setia, pemikir, menerapkan hubungan

yang demokratis antar sesama, menjadi individu yang mudah menyesuaikan diri, dan orang yang berpartisipasi aktif. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan menurut Ahmad Sanusi dalam Cholisin (2000: 1.17) diantaranya adalah membina masyarakat menurut syarat-syarat konstitusi untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab, latihan berdemokrasi dan kepemimpinan. (Simorangkir, 2000: 1.18) yaitu memberikan pengetahuan tentang bangsa dan negara, meningkatkan kesadaran untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab serta mempersiapkan putra-putri bangsa menjadi generasi penerus bangsa yang baik. kemudian tujuan pendidikan kewarganegaraan juga dipertegas lagi oleh (Aziz Wahab dan Sapriya, 2011: 315) bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan mengacu pada lampiran Permendiknas Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006 adalah mengajarkan peserta didik untuk berpikir kritis, berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab, mengembangkan demokratis dan mengembangkan diri ke arah positif sehingga mampu berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia

Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah proses kegiatan untuk menciptakan warga negara yang mau melibatkan diri dan mempunyai keinginan kuat untuk memajukan bangsa ke arah positif berlandaskan kecintaan tanah air sesuai dengan aturan, konstitusi dan ideologi negara.

3. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Pelaksanaan ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana diatur dalam UU No.20/2003, Pemerintah menertibkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Standar Nasional Pendidikan Ketentuan mengenai kurikulum yang diatur dalam PP No. 19/2009 (Wanda Rizky Febrianto, 2011) diantaranya adalah tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum. Dalam pasal 6 ditegaskan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan menengah terdiri atas:

- a. Kelompok mata pelajaran Agama Dan Akhlak Mulai.
- b. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian .

- c. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Kelompok mata pelajaran estetika.
- e. Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.

Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian di sd/MI/SLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/ Paket A, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK. atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan atau kegiatan agama, akhlak mulia kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya dan pendidikan jasmani. Hal ini diatur dalam PP No. 19/2005 adalah berkenaan dengan kedalaman muatan kurikulum. Dalam Aziz Wahab dan Sapriya (2011: 329-330) dituliskan cakupan Pendidikan Kewarganegaraan yang termuat dalam standar isi Pendidikan Kewarganegaraan di Permendiknas Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006, cakupan materi Pendidikan Kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan.
2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistem hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional.
3. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
4. Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan warga negara.

5. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi.
6. Kekuasaan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi.
7. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.

Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.

D. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini fokus pada implementasi nilai-nilai Antikorupsi pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Untuk memperoleh gambaran sebagai perbandingan, maka akan dilakukan kajian terhadap penelitian yang relevan, yaitu:

1. Judul Skripsi : Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Universitas Muhammadiyah Makassar. Oleh Nur Syariah (105431101916) Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, tahun 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegara dan kendala yang dihadapi dalam implementasi pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil latar Universitas Muhammadiyah Makassar. Subjek penelitian dari penelitian ini adalah dosen dan mahasiswa. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan

keabsahan data dilakukan dengan mengadakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data dilakukan dengan dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain kemudian disimpulkan.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) pendidikan anti korupsi sudah ada dalam kurikulum dan sudah diimplementasikan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan namun masih ada beberapa dosen yang belum mengintegrasikan pemahaman anti korupsi dengan materi kuliah yang disajikan sehingga pembelajaran pendidikan anti korupsi ini tidak semua mahasiswa mengetahuinya atau mempelajarinya. (2) Hambatan Internal ,segi kemampuan dosen mengimplementasikan pendidikan anti korupsi dalam proses pembelajaran. Terkadang dosen merasa kewalahan banyaknya materi muatan yang ada, Hambatan Eksternal kemampuan mahasiswa memahami materi pembelajaran.cara mahasiswa mengimplementasikan pendidikan anti korupsi itu agar dapat termotivasi dengan melakukan tindakan jujur baik dilingkungan kampus maupun diluar lingkunagn kampus. Akan tetapi sebagian dari mahasiswa hanya melakukan nilai-nilai karakter didalam lingkungan kampus bahkan masih ada mahasiswa yang hanya mendengarkan ketika didalam kelas.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama menekankan pada nilai anti korupsi .Perbedaannya yaitu sasaran penelitian ini ialah mahasiswa sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan peserta didik sekolah menengah atas.

2. Judul Skripsi : Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai Anti Korupsi Pada Siswa Melalui Mata Pelajaran Ppkn Di SMP Muhammadiyah 1 Medan. Oleh Sheilla Zihan Nadya Harahap (1502060002). Program studi pendidikan kewarganegaraan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan tahun 2019. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui apakah guru itu memiliki peranan dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini adalah Guru PPKn SMP Muhammadiyah 1 Medan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka, wawancara, dan angket. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah display data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa guru di SMP Muhammadiyah 1 Medan memiliki peran dalam menanamkan nilai anti korupsi melalui mata pelajaran PKn. Dalam menanamkan nilai anti korupsi pada siswa, guru mengintegrasikan nilai-nilai luhur seperti nilai keadilan, kejujuran, keberanian, tanggung jawab, kepedulian, kesederhanaan, kemandirian, dan yang terakhir kerja keras kedalam proses pembelajaran dan juga lingkungan serta peraturan sekolah. Kesuksesan dalam mengimplementasikan nilai anti korupsi di SMP Muhammadiyah 1 Medan tidak lepas dari kebijakan Kepala Sekolah, Dewan Guru (khususnya guru PKn), dan seluruh warga sekolah, sehingga menanamkan nilai anti korupsi dapat berlangsung dengan baik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama menekankan pada implementasi nilai anti korupsi di sekolah. Perbedaannya yaitu sasaran penelitian ini ialah peserta didik Sekolah Menengah Atas dan penelitian ini menggunakan teori nilai anti korupsi dari Bertens sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan, sasarannya ialah penelitian ini menggunakan teori nilai dari Noor Salimi dan Chabib.

3. Judul Skripsi : Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Di Madrasah Aliyah Negeri 3 Medan. Oleh Saimah Sakilah Dalimunthe (033117304). Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Tahun 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk : mendeskripsikan : (1) Nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran Aqidah Akhlak di MAN 3 Medan. (2) Implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran Aqidah Akhlak di MAN 3 Medan. (3) Hambatan penerapan nilai-nilai pendidikan antikorupsi pelajaran Aqidah Akhlak di MAN 3 Medan. Subyek penelitian ini

Kepala sekolah MAN 3 Medan, Wakil Kepala MAN 3 Medan, Guru Aqidah Akhlak Madrasah MAN 3 Medan, Wali Kelas, Tata Usaha MAN 3 Medan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah *display* data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Nilai Pendidikan Antikorupsi yang Terkandung pada mata Pelajaran Aqidah Akhlak di MAN 3 Medan Nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang terkandung melalui mata pelajaran Aqidah Akhlak di MAN 3 Medan yaitu: nilai kejujuran, nilai keadilan, nilai tanggung jawab dan amanah, nilai kerja keras, nilai ikhlas, nilai kesabaran. (2) Implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran aqidah akhlak di MAN 3 Medan. Menetapkan langkah-langkah implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran Aqidah Akhlak di MAN 3 Medan. Menetapkan metode dalam proses penerapan nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran Aqidah Akhlak di MAN 3 Medan, Menetapkan tujuan penerapan nilai-nilai pendidikan antikorupsi. (3) Hambatan yang dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi di MAN 3 Medan. Kurangnya pemahaman siswa terhadap materi nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran Akidah Akhlak, Minimnya kesadaran dalam diri siswa tentang pentingnya nilai-nilai antikorupsi pada mata pelajaran Akidah Akhlak dalam membentuk perilaku antikorupsi. Keterbatasan fasilitas untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi melui tampilan drama di MAN 3 Medan. 2) Lingkungan keluarga yang kurang mendukung dalam hal libur sekolah (tidak masuk karena sakit tetapi kenyataan pergi bersama keluarga).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sama-sama menekankan pada pendidikan anti korupsi di sekolah. Perbedaannya yaitu sasaran penelitian ini ialah peserta didik MAN dan penelitian ini dilihat dari perspektif agama Islam, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan, sasarannya ialah peserta didik Sekolah Menengah Atas dan tidak dilihat dari perspektif islam melainkan dilihat secara umumnya.

